



ANALISIS WACANA “HARI BEBAS BERBICARA”: REPRESENTASI KEBEBASAN DAN KEBENARAN DALAM NOVEL *BUNGKAM SUARA* KARYA J.S KHAIREN

Didik Wahyu Pratama¹, Achmad Herman², Fadhliah³, etc.

¹Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, dika23gen@gmail.com.

²Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, achmadherman@gmail.com.

³Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, fadhliah@fisip.untad.ac.id.

Corresponding Author: dika23gen@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to examine and analyze how the novel Bungkam Suara represents freedom of speech through the “Free Speech Day” and how truth is produced and regulated within the discourse of this event in the novel. A qualitative descriptive research method was employed, utilizing observation and documentation for data collection. The analysis utilized Michel Foucault’s model of critical discourse analysis, focusing on two aspects: representation and misrepresentation. The findings indicate that through the “Free Speech Day”, granted only once a year, the author demonstrates that freedom is not entirely neutral. While freedom can serve as a means to convey truth, expose injustice, and resist oppression, it can simultaneously be misused to spread slander and hatred, as well as to manufacture misleading opinions. This reveals that freedom of speech is inextricably linked to power and specific interests. Meanwhile, truth is portrayed as the outcome of a struggle between competing discourses vying for legitimacy in the public sphere. The characters in the novel demonstrate that the voices deemed “true” are often shaped by social position, power, and the ability to control information.*

Keyword: *Free Speech Day, Bungkam Suara Novel, Critical Discourse Analysis Michel Foucault.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana novel Bungkam Suara merepresentasikan kebebasan berbicara melalui “Hari Bebas Berbicara” dan bagaimana kebenaran diproduksi dan diregulasi dalam wacana “Hari Bebas Berbicara” di dalam novel Bungkam Suara. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif, sementara teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis wacana kritis model Michel Foucault yang fokus kepada 2 hal, yaitu representasi dan misrepresentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui “Hari Bebas Bicara” yang diperoleh hanya dalam satu hari setiap tahun, penulis memperlihatkan bahwa kebebasan bukanlah sesuatu yang sepenuhnya netral. Kebebasan dapat menjadi sarana untuk menyampaikan kebenaran, mengungkap ketidakadilan, dan melawan penindasan, tetapi pada saat yang sama juga dapat disalahgunakan untuk menyebarkan fitnah, kebencian, serta membangun opini yang menyesatkan. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berbicara selalu berada dalam hubungan yang erat dengan kekuasaan dan kepentingan tertentu.

Sementara kebenaran digambarkan sebagai hasil pertarungan berbagai wacana yang saling bersaing untuk memperoleh legitimasi di ruang publik. Tokoh di dalam novel memperlihatkan bahwa suara yang dianggap benar seringkali dipengaruhi oleh posisi sosial, kekuasaan, dan kemampuan dalam mengendalikan informasi.

Kata Kunci: Hari Bebas Bicara, Novel Bungkam Suara, Analisis Wacana Kritis Michel Foucault.

PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat telah lama diatur dalam perundang-undangan baik yang tertuang pada hukum internasional Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia maupun Undang-undang Dasar 1945 pasal 28. Kebebasan mengeluarkan pendapat ini merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. Hak berpendapat mencakup kebebasan berpendapat secara lisan maupun tulisan. Sebelumnya kebebasan ini hanya terbatas melalui media massa seperti televisi, radio, dan koran, ataupun melalui demonstrasi dan sebagainya. Namun saat ini, dengan berkembangnya teknologi dan makin maraknya media sosial yang bermunculan di internet, kebebasan berpendapat makin terbuka luas. Secara tradisional, kebebasan berbicara dipandang sebagai hak asasi individu untuk menyatakan pendapat tanpa sensor atau pembatas, esensi demokrasi dan kemajuan intelektual. Kebenaran sering kali dianggap sebagai sesuatu yang objektif dan dapat dicapai melalui rasionalitas.

Karya sastra merupakan manifestasi dari kebudayaan manusia sehingga yang terlihat dalam karya sastra adalah sebuah gambaran kehidupan masyarakat. Baik yang berkaitan dengan pola struktur, fungsi, maupun aktivitas dan kondisi social budaya sebagai latar belakang kehidupan Masyarakat pada saat karya itu diciptakan (Fananie, 2002). Karya sastra juga dapat dipandang sebagai perekam kehidupan social Masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dapat diartikan bahwa sastra dapat dipandang sebagai suatu gejala social karena sastra yang ditulis pada suatu kurun waktu tertentu dan merekam peristiwa zaman itu (Luxemburg, 1989).

Novel sebagai karya sastra memiliki kekuatan tersendiri sebagai medium ekspresif yang juga mengandung wacana sosial politik yang kaya, termasuk mengenai kebebasan dan kebenaran (Eagleton, 2008). Novel *Bungkam Suara* adalah sebuah novel bergenre politik satir yang berlatar belakang di sebuah Negara fiktif bernama Negara Kesatuan Adat Lemunesia (NKAL). Cerita berfokus pada tokoh utama bernama Timmy (Jujur Timur) yang keluarganya terbelit kasus kriminalitas digital, yaitu ayahnya dituduh melakukan kejahatan seperti *punishing* dan penipuan uang negara. Dalam novel ini ada konsep unik bernama Hari Bebas Berbicara, satu hari di mana warga negara diperbolehkan berpendapat dan mengungkapkan hal apapun tanpa takut dihukum dan menjadi inti dari konflik dan cerita. Novel ini mengandung banyak *plot twist* dan tokoh dengan sifat abu-abu dengan latar dunia yang maju secara teknologi dan politik, termasuk pengawasan ketat dan situasi sosial yang menyoroti fenomena seperti propaganda di media sosial.

Novel *Bungkam Suara* karya J.S Khairan hadir sebagai karya fiksi yang sangat relevan dengan keadaan politik Indonesia saat ini karena menggambarkan kritik tajam terhadap kekuasaan yang semena-mena, propaganda media massa, serta konflik dan fitnah yang menimbulkan perpecahan sosial. Novel ini dinilai sangat relevan dengan kondisi sosial politik di Indonesia saat ini, terutama terkait isu kebebasan berpendapat, penyalahgunaan informasi, dan polarisasi sosial.

Narasi hari bebas berbicara yang bertujuan untuk mencapai keadilan justru disalahgunakan, memicu tersebar jutaan aib, fitnah, kebencian, dan perundungan yang merusak tatanan sosial dari Tingkat personal hingga negara. Hal ini sangat mencerminkan kondisi media sosial di Indonesia, di mana kebebasan berekspresi sering disalahgunakan untuk menyebar hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah, yang menyebabkan perpecahan, polarisasi, dan

konflik antar kelompok. Novel ini relevan dengan perdebatan seputar undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik. Banyak pihak mengkritik pasal-pasal ini karena dianggap sebagai pasal karet yang berpotensi digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau institusi publik.

Novel ini menggambarkan bagaimana pemerintah NKAL membentuk “kebenaran” melalui propaganda dan kontrol media sosial, membatasi informasi yang beredar dan menciptakan narasi yang menguntungkan rezim. Hal ini sesuai dengan pemikiran Foucault bahwa kuasa memproduksi pengetahuan yang dijadikan kebenaran sosial, yang kemudian mengatur perilaku warga dan memanipulasi persepsi mereka.

“Ini adalah hari bebas bicara di Negara Kesatuan Adat Lawaknesia (NKAL). Siapa saja bebas berbicara terang-terangan tanpa takut terjatuh hukum. Tiap warga bebas berbicara membongkar semua kejahatan, membeberkan penipuan, ketidakadilan, hingga penindasan. Tujuannya, agar tercapai keadilan untuk seluruh rakyat. Namun, Kawan, tujuan mulia ini menjadi awan hitam. Jutaan aib terbongkar, jutaan fitnah dipanen. Jutaan kebencian dan perundungan berserakan. Rakyat berkelahi dengan rakyat. Tetangga dengan tetangga. Guru dengan murid. Karyawan dengan atasan. Anak dengan orangtua. Kekasih dengan kekasih. Ucapan orang terdekat merobek dinding tiap rumah. Ini adalah hari bebas bicara. Dendam, benci, amarah, lepas berkeliaran.” (Khairén, 2023 cetakan ke-2: 1).

Kutipan ini merepresentasikan paradigma Foucault tentang wacana kekuasaan yang membentuk kebenaran *truth regime* yang dalam novel ini menunjukkan bahwa kebebasan berbicara yang tanpa batas tidak otomatis menghasilkan keadilan atau kebenaran, tapi juga mengandung resiko penyebaran fitnah dan konflik sosial yang berakar dalam struktur kekuasaan dan pengawasan yang ketat. Novel ini menggambarkan konstruksi kebenaran sebagai suatu yang dipengaruhi oleh kekuasaan dan wacana yang mengatur siapa yang boleh berbicara dan bagaimana kebenaran itu dihasilkan dan dipertahankan.

Fokus dari penelitian ini akan diarahkan pada bagaimana novel *Bungkam Suara* merepresentasikan konsep kebebasan dan kebenaran melalui “hari bebas berbicara” dengan menggunakan kerangka analisis wacana Michel Foucault. Penelitian bisa mengkaji bagaimana kekuasaan membatasi sekaligus memproduksi wacana kebebasan dan kebenaran, serta bagaimana wacana ini membentuk realitas sosial dan identitas subjek dalam novel. Aspek antara hubungan kekuasaan, pengawasan, propaganda, dan resistensi bisa menjadi fokus utama untuk menggali bagaimana kebebasan bicara direpresentasikan secara paradoks dan kompleks dalam konteks kontrol politik yang ketat.

Novel *Bungkam suara* sangat menarik untuk diteliti karena kompleksitas temanya sebagai fiksi dystopia yang secara cerdas berfungsi sebagai kritik sosial dan literasi politik yang mendalam. Novel ini tidak hanya membahas politik, tetapi juga peran media massa sebagai senjata propaganda. Ini yang membuat relevan untuk studi dalam bidang Ilmu komunikasi, Politik, Hukum, terutama terkait isu-isu digital. Novel ini secara tajam mengkritik korupsi, konflik kekuasaan, dan oligarki di mana system yang seharusnya melindungi rakyat justru dimanfaatkan oleh *elite* yang memperkaya diri dan mengeksploitasi kelemahan negara. Isu ini sangat relevan dengan perdebatan publik di Indonesia mengenai ketidakadilan structural dan control segelintir *elite* terhadap kebijakan publik.

Novel *Bungkam suara* karya J.S Khairén merefleksikan dinamika ideologi dan hegemoni masyarakat, dengan menyoroti bentuk ideologi otoritarianisme dan kapitalisme yang dominan. Secara keseluruhan novel *bungkam suara* berfungsi sebagai kaca pembesar bagi pembaca Indonesia untuk merenungkan konsekuensi dari kebebasan yang tidak bertanggung jawab dan dampak buruk dari system politik Indonesia yang tidak transparan dan rentan penyalahgunaan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana novel Bungkam Suara merepresentasikan kebebasan berbicara melalui “Hari Bebas Berbicara” dan bagaimana kebenaran diproduksi dan diregulasi dalam wacana “Hari Bebas Berbicara” di dalam novel Bungkam Suara berdasarkan analisis wacana kritis Michel Foucault. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengeksplorasi makna yang terkandung dibalik teks atau kalimat yang berada di dalam novel. Pemilihan novel Bungkam Suara karya J.S Khairen sebagai objek penelitian karena teks-teks di dalam novel tersebut menunjukkan banyak makna tersembunyi, terutama yang berhubungan dengan politik, khususnya pada peran media massa yang digunakan sebagai senjata propaganda.

Teknik pengumpulan data yang digunakan ada 2, yaitu teknik baca catat dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data menurut Teun A. Van Dijk yang terbagi atas 12 poin. Hanya saja pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 3 analisis data, yaitu: mengidentifikasi isi teks yang berisi tentang representasi kebebasan dan kebenaran pada hari bebas berbicara, menganalisa wacana yang merepresentasikan kebebasan dan kebenaran pada hari bebas berbicara dalam novel *bungkam suara* karya J.S Khairen, dan menyimpulkan hasil analisis wacana kritis Michele Foucault mengenai representasi kebebasan dan kebenaran pada hari bebas berbicara dalam novel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Novel Bungkam Suara karya J.S Khairen berjumlah 376 halaman. Cerita dalam Bungkam Suara Karya J.S Khairen berfokus pada sejarah dinamika politik NKAL. Pada awalnya, NKAL terdiri dari Kerajaan-kerajaan kecil yang kemudian Bersatu untuk membuat sebuah negara atau Kerajaan besar. System kepemimpinan NKAL pun unik, dengan adanya dua pemimpin tertinggi dari Raja Utama dan Pemangku Adat. Raja dipilih secara bergilir bergantian dari masing-masing Kerajaan, sedangkan Pemangku Adat dipilih langsung oleh rakyat setiap delapan tahun sekali.

Masyarakat NKAL memiliki tradisi yang kontroversial yaitu Hari Bebas Berbicara, dimana satu hari bagi warga negara diizinkan berbicara secara bebas tanpa takut dihukum. Namun, pada dasarnya Hari Bebas Berbicara sebagai simbol kebebasan berpendapat, dalam praktiknya hari ini malah sering disalahgunakan sebagai alat propaganda politik dan menyebar fitnah. Pada Episode 1, judul yang tertera adalah “Bebas Bicara”. Berlatar di Distrik Neang, sebuah distrik di bawah rezim yang mengontrol segala aktivitas warga melalui CCTV yang terhubung ke istana kerajaan. Warga tidak boleh berbicara bebas kecuali pada “Hari Bebas Berbicara”. Hari Bebas Berbicara adalah satu hari khusus di mana seluruh masyarakat diizinkan berbicara. Akan tetapi, setahun yang lalu, Ayah Timmy, pemeran utama pada novel ini, dicap sebagai kriminal tingkat tinggi.

Keluarga Timmy menjadi keluarga kriminal setelah ayahnya dihukum sebagai pendosa besar dan dianggap penipu oleh negara. Mereka mengalami diskriminasi, kemiskinan, dan kehilangan hak untuk hidup normal. Setiap gerak-gerik yang mereka lakukan selalu diawasi oleh CCTV. Setiap orang yang dilewati, menatap mereka dengan tatapan kebencian. Hanya saja, pada Episode 01 ini, peneliti masih belum menemukan alasan mengapa Ayah mereka ditangkap dan kesalahan apa yang Ayah perbuat sehingga mereka sekeluarga harus menanggung penderitaan akibat diskriminasi. Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan, maka representasi makna dari kalimat-kalimat yang berada di Episode 1 adalah sebagai berikut:

“Jangankan menyapa burung jelek itu, manusia menyapa manusia lainnya saja tidak ada. Orang-orang takut karena gerak-gerik mereka terekam CCTV. Langsung terpantau di istana kerajaan.”

Kutipan di atas menciptakan realitas bahwa dalam sistem ini, manusia telah direduksi menjadi terisolasi yang takut pada satu sama lain karena *“gerak-gerik mereka terekam CCTV. Langsung terpantau di Istana Kejaraan.”* Kutipan tersebut mengontruksi bahwa pengawasan total bukanlah penyimpangan, melainkan kondisi normal yang harus diterima sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

“Berangkat kerja atau sekolah, pulang, diam. Itu saja aktivitas orang-orang di distrik ini. Harus patuh, menurut, jalani hidup. Tidak boleh aneh-aneh.”

Kutipan teks di atas menciptakan realitas kehidupan sebagai mekanisme tanpa makna, di mana kepatuhan dan kesunyian menjadi satu-satunya eksistensi yang diizinkan. Dalam konteks ini, bahasa tidak sekadar menggambarkan realitas, melainkan menciptakan realitas di mana kebebasan dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Representasi terhadap keluarga Timmy menunjukkan mekanisme yang lebih spesifik dan konstruksi realitas sosial. Ketika narrator menyatakan bahwa:

“Kini semua orang di Distrik Neang benci keluarga Timmy. Itu karena kejadian setahun lalu, saat Ayahnya dihukum jadi pendosa besar di negara ini.”

Label *“pendosa besar”* dan *“keluarga kriminal”* yang melekat pada Timmy dan Ibunya bukan sekedar deksripsi fakta, melainkan konstruksi identitas yang menciptakan realitas baru di mana seluruh keluarga menjadi kriminal yang layak diawasi, dikucilkan, dan dibenci. Pada kalimat berikutnya menunjukkan reaksi masyarakat dengan kalimat yang menusuk.

“Melihat keluarga ini semua orang pasti langsung jijik dan marah. Padahal yang membuat kesalahan bukan mereka, melainkan Ayah.”

Kalimat di atas merupakan representasi emosional yang paling kuat. Kata *“pasti”* menciptakan realitas bahwa jijik dan marah adalah respon otomatis dan tidak perlu dipertanyakan. Bahkan dalam kutipan tersebut dapat kita lihat bahwa Timmy dan Ibunya tidak bersalah. *“yang membuat kesalahan bukan mereka, melainkan Ayah”*. Tapi tetap saja, representasi emosional yang diciptakan adalah kebencian terhadap seluruh keluarga. Ini menunjukkan bahwa seseorang bersalah bukan karena tindakan pribadinya, melainkan karena siapa yang mereka kenal terasa wajar dan tidak bisa dihindari.

“Tidak ada sekolah lagi yang mau menerima Ulung sejak ayah mereka menjadi kriminal tingkat tinggi.”

Penggalan kalimat di atas memperlihatkan representasi kekuasaan yang benar-benar ditunjukkan secara terang-terangan. Hal ini bisa terlihat dari pendidikan yang seharusnya menjadi hak masyarakat dicabut karena status politik keluarga. Representasi ini menciptakan realitas bahwa anak dari keluarga yang *“bermasalah”* tidak berhak atas masa depan. Padahal, yang salah adalah ayahnya, tapi mengapa mereka juga turut mendapatkan hukuman atas sesuatu yang hingga detik ini tidak mereka ketahui?

Selanjutnya, pada poin misrepresentasi, peneliti hanya mendapatkan dua poin saja, yaitu ekskomunikasi dan delegitimasi. Ekskomunikasi adalah bentuk misrepresentasi yang paling ekstrem karena ia tidak sekedar membungkam, melainkan menghapus subjek dari ranah pembicaraan. Di Distrik Neang, ekskomunikasi terjadi pada level massal. Hal tersebut dapat digambarkan pada kalimat berikut:

“Jangankan menyapa burung jelek itu, manusia menyapa manusia lainnya saja tidak ada.”

Kalimat di atas adalah bentuk ekskomunikasi struktural. Bukan satu atau dua orang yang dibungkam, melainkan seluruh warga distrik. Warga distrik tidak lagi berfungsi sebagai subjek yang bisa berdialog, berdebat, atau bernegosiasi. Mereka direduksi menjadi objek-objek sunyi yang hanya menjalankan perintah. Dalam konteks Foucault, ini adalah ekskomunikasi total dimana ruang publik dialogis telah dihapuskan, sehingga kebenaran tidak lagi bisa diuji melalui percakapan melainkan ditentukan sepihak oleh pihak berkuasa. Kebebasan bicara tidak hanya dibatasi ia ditiadakan sepenuhnya. Konsep “hari bebas bicara” dalam novel penuh ironi kritis. Secara etimologis “bebas bicara” mengimplikasikan adanya kebebasan untuk mengungkapkan pikiran, opini, dan kebenaran tanpa rasa takut. Namun dalam praktiknya, hari ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang lebih canggih dari pada larangan bicara sehari-hari.

Dalam kondisi normal, warga distrik Neang tidak sembarangan bicara karena dilarang ini adalah kontrol langsung yang transparan. Namun pada “hari bebas berbicara”, warga diizinkan bicara, tetapi hanya untuk mengucapkan apa yang telah izinkan oleh system. Hari ini menjadi momen pelepasan tekanan terkontrol di mana kebencian yang telah ditanamkan oleh negara terhadap keluarga Timmy bisa diekspresikan secara terbuka, sehingga memperkuat consensus palsu bahwa kebencian tersebut adalah hasil dari Keputusan kolektif. Ironi terjadi ketika Ulung, dalam emosinya yang meluap, berkata kasar saat bermain game dengan teman-temannya. Timmy segera menegur dengan ketakutan.

“Hei. Jangan berkata kasar! Kamu bisa ditangkap. Ini belum Hari Bebas Bicara!”

Sementara itu, hinaan terhadap ayahnya yang jauh lebih kejam “*Hee ayahnya penipu, dia juga pasti penipu*” tidak ditegur. Ini menunjukkan bahwa “kebebasan” dalam Hari bebas bicara bersifat selektif. Kebebasan untuk menghina pihak yang didegitimasi diizinkan kapan saja, sedangkan kebebasan untuk membela diri hanya diizinkan pada hari tertentu dan bahkan pada hari itu pun tidak dijamin keabsahannya. Dalam konteks Foucault, Hari bebas bicara merupakan contoh biopolitik canggih negara tidak menghilangkan kebebasan secara total, melainkan mengatut dan mengelola kebebasan sedemikian rupa sehingga kebebasan itu justru memperkuat, bukan melemahkan, struktur kekuasaan. Negara membiarkan rakyat “bicara” agar mereka merasa bebas, tetapi sebenarnya mereka hanya mengulangi narasi yang ditentukan. Ini adalah kebebasan yang dikendalikan.

Selanjutnya pada poin delegitimasi. Perlu diketahui, delegitimasi yang dimaksud pada wacana kritis model Foucault merupakan sebuah penekanan bahwa hanya kelompok sendiri (kami) yang benar, sedangkan kelompok lain tidak benar, tidak layak, dan tidak absah. Hal ini dapat ditunjukkan pada adegan di mana Ulung dihina oleh teman-teman di dalam game dan saat di mana Ulung tidak diterima di sekolah mana pun hanya karena ia memiliki ayah kriminal. Padahal, melalui kalimat “*Padahal yang membuat kesalahan bukan mereka, melainkan Ayah*” sudah digambarkan bahwa mereka protes terhadap perlakuan orang-orang kepada mereka.

Kemudian pada kalimat “*Namun kini semua orang di Distrik Neang benci keluarga Timmy*” menunjukkan bahwa kesalahan satu orang di dalam keluarga bisa membuat keluarga yang lain terkenal imbasnya. Hanya saja, yang menjadi perhatian peneliti di sini adalah perlakuan orang-orang kepada mereka. Seakan-akan hanya kelompok mereka yang benar. Padahal, setiap orang pernah berbuat kesalahan, namun kenapa mereka tidak dihukum juga? Hal ini jelas menunjukkan bahwa praktik delegitimasi tergambar jelas dari yang telah dialami oleh keluarga Timmy.

Selanjutnya pada Episode 2 yang berjudul “Goreng” menceritakan saat Timmy dan ibunya akan pergi bekerja di kebun durian untuk mendapatkan uang. Dalam perjalanan, mereka menghadapi tatapan sinis dari semua orang yang melihat mereka. Hal ini memang sudah

merupakan makanan sehari-hari bagi keluarga Timmy sejak ayahnya ditetapkan sebagai kriminal dan mendekam di penjara. Selain itu, mereka juga bertemu dengan orang yang terlibat dengan konspirasi bersama selebriti. Tidak hanya itu, di media sosial sedang heboh sebab ada akun anonim yang ingin membongkar aib perusahaannya. Hanya saja, semua kebenaran itu akan dibongkar pada Hari Bebas Bicara, sebab hanya di hari itulah setiap orang boleh berbicara dengan leluasa. Kemudian, saat Timmy dan ibunya sudah naik di kereta, mereka selalu melihat papan iklan yang menampilkan iklan propaganda dari pemerintah yang tujuannya untuk membuat rakyat takut. Akan tetapi, setelah mereka turun dari kereta, iklan yang tidak pernah ditampilkan selama ini pun akhirnya ditampilkan. Hal yang membuat Timmy terkejut adalah bahwa di dalam iklan tersebut adalah ayahnya yang sedang mengalami penyiksaan. Bersamaan dengan itu, mereka kemudian menjadi bahan hinaan bagi orang-orang yang melihat mereka di stasiun kereta.

Pada Episode 02 ini, peneliti melihat bahwa realita kekuasaan dari rezim yang memerintah NKAL (Negara Kesatuan Adat Lemunesia) sangat ditampilkan dengan jelas. Hal itu bisa dibuktikan dengan gerak-gerik setiap masyarakat yang selalu dipantau CCTV dan juga iklan-iklan propaganda yang selalu ditayangkan di papan iklan. Melalui hal tersebut, peneliti melihat bahwa Episode ini merepresentasikan hal-hal berikut:

“Toh Kepolisian Kerajaan juga tak punya waktu menangkap puluhan ribu orang sekaligus. Pengecualian bila yang jadi korban mulut jahat adalah selebritis, orang kaya, pejabat, orang-orang penting, nah itu pasti diurus. Undang-undang pasti bekerja. Kepolisian Kerajaan pasti turun tangan. Bahkan di kasus-kasus tertentu, pasukan yang lebih elit lagi yaitu Tentara Kerajaan pun akan turun.”

“Sekeras apa juga mereka bekerja, takkan pernah naik status jadi orang kaya, bahkan sekadar orang pas-pasan. Mereka benar-benar tak paham bahwa sistem di bangsa inilah yang membuat mereka begitu.”

Pada kalimat *“Pengecualian bila yang jadi korban mulut jahat adalah selebritis, orang kaya, pejabat, orang-orang penting, nah itu pasti diurus. Undang-undang pasti bekerja. Kepolisian Kerajaan pasti turun tangan”* menunjukkan bahwa pemerintah secara tidak langsung menerapkan hukuman secara pilih kasih. Artinya, jika orang memiliki uang, orang yang memiliki status, orang yang memiliki kuasa, tidak boleh menerima kritik atau menerima hinaan serta mulut jahat dari orang lain. Jika itu terjadi, maka kepolisian kerajaan akan turun tangan. Hal itu kemudian dipertegas pada kalimat *“Nah itu pasti diurus. Undang-undang pasti bekerja”*. Artinya, jika yang menjadi korban adalah masyarakat kelas bawah, maka kasusnya akan lambat diurus.

Selanjutnya pada kalimat *“Mereka benar-benar tak paham bahwa sistem di bangsa inilah yang membuat mereka begitu”* mengartikan bahwa di negara yang mereka tinggal, sekeras apapun mereka berusaha, hidup mereka akan begitu-begitu saja. Secara tidak langsung, pemerintah mereka sangat berkuasa sehingga kehidupan rakyat hanya dibiarkan seperti itu-itu saja. Jika bisa dikontrol oleh pemerintah, maka mungkin kehidupan mereka akan lebih baik. Namun jika berasal dari kalangan bawah, maka selamanya mereka akan begitu-begitu saja. Artinya, sistem siklus kehidupan mereka sudah ditentukan oleh pemerintah dan itu kebenaran yang harus mereka terima selama menjadi warga NKAL.

“Hal menggemparkan di kantor saya ini akan saya ungkapkan tepat di menit pertama Hari Bebas Bicara! Pukul 06.00 pagi! Jadi jika nanti saya kenapa-kenapa sebelum hari itu, yang mana yaaa tiga hari lagi, setidaknya saya sudah jadwalkan untuk terungah otomatis!”

Kalimat di atas menunjukkan adanya ketidakbebasan seseorang dalam berbicara mengenai fakta kebusukan dari suatu instansi. Jadi walaupun ia mengetahui banyak hal, tapi ia tidak bisa mengkritik, sebab semuanya hanya bisa dibongkar saat Hari Bebas Bicara saja. Pada kalimat *“Jadi jika nanti saya kenapa-kenapa sebelum hari itu”* mengartikan bahwa berbicara kebebasan sebelum Hari Bebas Bicara adalah suatu kejahatan yang mana taruhannya adalah nyawa. Olehnya, seluruh warga memang dibungkam oleh pemerintah.

“Para tentara akhirnya menemukan, alamat komputer yang terdata dari serangan itu adalah komputer Ayah Timmy di kantornya. Meski Ayahnya tak pernah mengaku, bukti itu dianggap sudah kuat. Sejak saat itulah Timmy dan keluarga tak pernah lagi bertemu Ayahnya.”

Kalimat di atas menunjukkan bahwa para tentara yang diutus oleh kerajaan bekerja dengan tidak kompeten. Mengapa? Karena mereka enggan menyelidiki lebih jauh. Mereka tidak memikirkan adanya kemungkinan Ayah Timmy dijejek atau ada konspirasi yang lainnya. Pada kalimat *“Meski Ayahnya tak pernah mengaku, bukti itu dianggap sudah kuat”* menunjukkan bahwa Ayah Timmy sudah mengaku tidak bersalah, namun dengan bukti yang sedikit itu, mereka sudah menganggapnya bersalah dan tidak kuat. Artinya, pembelaan dari seseorang tidak bisa dijadikan sebagai pertimbangan bagi penegak hukum untuk menyelidiki lebih jauh.

Melalui hal-hal yang telah dijelaskan di atas, peneliti menilai bahwa unsur representasi yang ditunjukkan di Episode 02 sangat jelas memperlihatkan bahwa kebenaran dan kebebasan tidak didapatkan oleh setiap warga, sebab dikontrol oleh pemerintah. Walau mereka mengetahui sebuah kebenaran, mereka tidak bisa bersuara dengan bebas. Olehnya, peneliti akan menjelaskan lebih lanjut melalui poin-poin misrepresentasi. Poin-poin misrepresentasi yang terdapat pada episode ini adalah eksklusi, marginalisasi, dan delegitimasi. Marginalisasi terlihat saat keluarga Timmy dipandang dan dianggap buruk oleh semua masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh Ayah Timmy yang ditangkap sebab dinilai menjadi kriminal yang merugikan banyak orang. Timmy dikeluarkan dari pekerjaan, ibunya pun sama, bahkan adiknya tidak diterima di sekolah. Tatapan sinis dari orang-orang di sekitarnya menunjukkan bahwa praktik marginalisasi ini tergambar dengan jelas.

“Sejak Ayah kena vonis masuk penjara, polisi, kerumunan wartawan dan hal-hal tak enak lain adalah makanan sehari-hari keluarga Timmy.”

“Sementara akun Timmy? Warnanya kuning. Pertanda ia warga yang mencurigakan. Begitu juga dengan Ulung dan Ibu.”

“Dan hukum menetapkan Ayah Timmy pelakunya. Inilah penyebab kenapa keluarga Timmy begitu dibenci.”

“MALING!”

“PENIPU!”

“KRIMINAL!”

“KE MANA UANG SAYA DIBAWA BAPAKMU?”

“APA? KAU MAU MENGADUKAN KAMI? ITU FAKTA YANG SAYA UCAPKAN!”

Kalimat-kalimat di atas merupakan contoh praktik marginalisasi yang dialami oleh keluarga Timmy. Kalimat *“Sejak Ayah kena vonis masuk penjara, polisi, kerumunan wartawan dan hal-hal tak enak lain adalah makanan sehari-hari keluarga Timmy”* menunjukkan bahwa keluarga Timmy setiap hari selalu mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari orang-orang

di sekitar mereka. Hanya karena ayahnya penjahat, maka mereka sekeluarga juga dicap sebagai penjahat. Mengapa hanya karena kesalahan satu orang, semua yang terkena imbasnya?

Praktik marjinalisasi ini juga sampai kepada ranah media sosial. Bukan hanya disekitar lingkungan saja, tapi media sosial keluarga Timmy diberi label berwarna kuning yang berarti mencurigakan. Artinya, permasalahan mengenai keluarga mereka telah diketahui oleh seluruh warga NKAL dan semuanya menghakimi mereka. Hal itu tergambar jelas pada kalimat *“Sementara akun Timmy? Warnanya kuning. Pertanda ia warga yang mencurigakan. Begitu juga dengan Ulung dan Ibu”* yang berarti keluarga mereka memang harus dicurigai. Pada kasus ini, pemerintah juga turut membentuk opini publik sehingga beramai-ramai memarjinalkan keluarga Timmy.

Selanjutnya, praktik eksklusi terjadi pada saat Ayah Timmy diinterogasi oleh pihak tentara kerajaan. Ayah Timmy sudah diberi kesempatan untuk berbicara dan membela diri, akan tetapi, suaranya tidak didengarkan karena dianggap bukti yang didapatkan sudah kuat. Hal tersebut tergambar pada kalimat *“Meski Ayahnya tak pernah mengaku, bukti itu dianggap sudah kuat. Sejak saat itulah Timmy dan keluarga tak pernah lagi bertemu Ayahnya”* yang memperkuat bukti bahwa sekeras apapun Ayah Timmy tidak mengakui perbuatannya, ia tetap dianggap salah. Artinya, ia hanya diikuti di dalam pembicaraan, tapi tidak dianggap, sebab sejak awal tersangkanya sudah ditetapkan.

Selanjutnya adalah praktik delegitimasi yang tergambar pada kalimat *“Dan memang menjadi salah satu video andalan untuk disebarkan ke seantero NKAL. Propaganda menebar ketakutan supaya tak ada lagi pejabat yang berani macam-macam”*. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menebar teror dan juga propaganda kepada masyarakat agar tidak ada yang melawan kepada mereka. Video itu terus-menerus diputarkan setiap waktu ke seluruh negara NKAL, agar masyarakat melihat. Jika pejabat berbuat kesalahan saja masih dihukum seperti itu, maka rakyat biasa pun jika melawan, maka kemungkinan akan mengalami penyiksaan yang lebih kejam,

Seperti yang telah diketahui, tujuan dari propaganda adalah untuk memengaruhi sikap dan tingkah laku dari kelompok sasaran. Para propagandis umumnya sedang berusaha untuk mengolah kelompok sasaran agar mereka dapat menerima pesan dan menjadikan pesan itu menjadi kenyataan dalam tindakan (Kunandar, 2017: 22). Jika dihubungkan dengan kalimat dan kejadian yang terjadi dalam novel, maka maksud dari propaganda yang dimaksud oleh mereka adalah memang menakuti masyarakat agar tidak ada satu pun orang yang berani melawan. Sebab jika berani melawan dan berbuat kesalahan, maka mereka harus siap menanggung akibatnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, peneliti menilai bahwa sastra tidak sekadar berfungsi sebagai refleksi estetik dari realitas, melainkan merupakan media pertempuran ideologis di mana bahasa digunakan untuk mengukuhkan atau menantang struktur kekuasaan. Fokus utama dari penelitian ini terletak pada konsep “Hari Bebas Bicara” yang ditawarkan oleh sang penulis, JS. Khairen, dalam novelnya. Konsep ini bukan sekadar latar belakang cerita, melainkan sebuah konstruksi diskursif yang paradoksal. Pada dunia nyata, kebebasan bicara adalah hak asasi yang melekat pada diri setiap manusia. Akan tetapi, ketika kebebasan itu dibatasi, maka akan berubah menjadi sesuatu yang kacau.

Pada novel ini, negara atau penguasa di dalam novel, mereduksi kebebasan dari sebuah “hak fundamental” menjadi sebuah “privilege” atau sebuah hak istimewa yang diberikan oleh penguasa kepada pihak yang dikuasai. Melalui lensa Analisis Wacana Kritis atau AWK, peneliti melihat bahwa bahasa di dalam novel Bungkam Suara tidak pernah netral. Setiap dialog, monolog, maupun deskripsi naratif merupakan manifestasi dari relasi kuasa. “Hari Bebas Bicara” yang dimaksud dalam novel ini bukan sebagai ruang pembebasan bagi orang-orang, melainkan sebagai mekanisme pelepasan emosi yang terkontrol bagi setiap orang. Penguasa menyadari bahwa penekanan yang terlalu ketat akan memicu ledakan perlawanan, sehingga mereka menciptakan ruang di mana satu hari rakyat diizinkan untuk berteriak tanpa

konsekuensi. Novel ini menunjukkan bahwa “Bungkam Suara” bukanlah ketiadaan suara, melainkan sebuah bentuk perlawanan akibat dari trauma. Mereka dipaksa bungkam oleh penguasa sebab takut oleh kekuatan yang ditunjukkan. Propaganda yang dilakukan pun membentuk pikiran masyarakat. Alhasil, masyarakat menjadi mudah dikendalikan.

Relevansi dari analisis wacana dalam penelitian ini melampaui batas-batas fiksi. Penelitian ini secara tidak langsung mengkritik fenomena di dunia nyata, di mana kebebasan berekspresi di ruang digital seringkali membuat seseorang terjebak di dalam ilusi. Media sosial seringkali menjadi “Hari Bebas Bicara” modern di mana setiap orang merasa bebas bersuara, namun pada saat yang sama, algoritma dan kebijakan dari platform bertindak sebagai penguasa tak kasat mata yang mengontrol narasi dan mendikte kebenaran. Pada akhirnya, penulis tidak sedang menuliskan sesuatu yang jauh, melainkan sedang mendeskripsikan fenomena masa kini yang memang membahayakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan pada BAB IV, maka peneliti menyimpulkan bahwa representasi kebebasan dan kebenaran dalam novel Bungkam Suara karya JS. Khairen berhasil membuktikan bahwa sastra tidak sekadar berfungsi sebagai sebuah fiksi atau imajinasi fiktif, melainkan sebagai bentuk kritik terhadap kekuasaan dan manipulasi. Pada novel ini, kebebasan berbicara tidak hanya direpresentasikan sebagai hak setiap individu, melainkan memperlihatkan bagaimana kebebasan tersebut dibentuk, dibatasi, dan dipengaruhi oleh relasi kuasa.

Melalui “Hari Bebas Bicara” yang diperoleh hanya dalam satu hari setiap tahun, penulis memperlihatkan bahwa kebebasan bukanlah sesuatu yang sepenuhnya netral. Kebebasan dapat menjadi sarana untuk menyampaikan kebenaran, mengungkap ketidakadilan, dan melawan penindasan, tetapi pada saat yang sama juga dapat disalahgunakan untuk menyebarkan fitnah, kebencian, serta membangun opini yang menyesatkan. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berbicara selalu berada dalam hubungan yang erat dengan kekuasaan dan kepentingan tertentu. Sementara kebenaran digambarkan sebagai hasil pertarungan berbagai wacana yang saling bersaing untuk memperoleh legitimasi di ruang publik. Tokoh di dalam novel memperlihatkan bahwa suara yang dianggap benar seringkali dipengaruhi oleh posisi sosial, kekuasaan, dan kemampuan dalam mengendalikan informasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penulis menggunakan “Hari Bebas Bicara” sebagai metafora terhadap realitas kehidupan masyarakat modern, terutama pada era ketika arus informasi berkembang dengan sangat cepat. Novel ini menyampaikan kritik sosial mengenai kebebasan berekspresi yang telah kehilangan tanggung jawab moral. Pada akhirnya, melalui cerita di dalam novel ini, peneliti melihat bahwa penulis sebenarnya ingin mengajak pembaca untuk bersikap kritis terhadap setiap informasi yang diterima dan tidak mudah percaya pada suatu hal sebelum menelusuri lebih jauh.

REFERENSI

- Fanie, Z. 2002. *Telaah Sastra*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Khairin, JS. 2024. *Bungkam Suara (Cetakan Ke-5)*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kunandar, Alip Yog. 2017. *Memahami Propaganda: Metode, Praktik, dan Analisis*. Sleman: Penerbit Kanisius.